

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar 2013 - 2018

Visi Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 adalah: **“BERSAMA MEMAJUKAN KARANGANYAR”**.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 5 (lima) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018, sebagai berikut:

1. Pembangunan Infrastruktur Menyeluruh.

Pembangunan fisik dan infrastruktur memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan lainnya. Pembangunan infrastruktur diarahkan pada sarana dan prasarana untuk meningkatkan pertumbuhan dan kelancaran perekonomian dengan memperhatikan aspek keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup serta tata ruang daerah. Pembangunan infrastruktur yang menyeluruh ini dalam konteks mewujudkan peningkatan pelayanan umum (*public service*) meliputi peningkatan infrastruktur dasar, infrastruktur sosial ekonomi dan infrastruktur pemerintahan.

Infrastruktur merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi serta merupakan aspek penting dalam peningkatan pelayanan publik. Kegiatan sektor transportasi merupakan tulang punggung pola distribusi baik barang maupun penumpang. Infrastruktur lainnya seperti kelistrikan dan telekomunikasi terkait dengan upaya modernisasi daerah dan penyediaannya yang merupakan salah satu aspek terpenting untuk meningkatkan produktivitas sektor produksi.

Ketersediaan sarana perumahan dan permukiman antara lain air minum dan sanitasi secara luas dan merata serta pengelolaan sumberdaya air yang berkelanjutan menentukan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, guna meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan publik diperlukan dukungan sarana dan prasarana pemerintahan berupa perkantoran dan sarana kerja, serta dukungan manajemen yang mampu meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Sejak lama infrastruktur diyakini merupakan pemicu bahkan pengungkit pembangunan suatu kawasan. Dapat dikatakan disparitas kesejahteraan yang terjadi antar kawasan diakibatkan oleh kesenjangan ketersediaan infrastruktur. Untuk memantapkan penyediaan infrastruktur ke depan di Kabupaten Karanganyar akan dilakukan pendekatan berbasis wilayah, agar pembangunan infrastruktur yang membutuhkan investasi biaya sangat besar akan difokuskan pada pengembangan wilayah sektor unggulan dan sektor prioritas.

2. Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri.

Berkurangnya pekerjaan pada perusahaan mengakibatkan banyaknya angkatan kerja yang tidak tertampung, padahal fenomena ini setiap tahun meningkat. Maka untuk mengurangi angka pengangguran perlu ditumbuhkan semangat untuk berusaha mandiri disamping untuk diri pribadinya diharapkan dapat membuka lapangan kerja. Usaha mandiri dapat dilakukan di beberapa sektor : pertanian peternakan, jasa dan lain sebagainya. Maka peran pemerintah untuk menciptakan wirausahawan mandiri dapat dilakukan dengan pemberian pendidikan teknologi tepat guna, pemasaran dan bantuan stimulan sebagai modal awal untuk membuka usaha.

Peningkatan produktivitas yang berdaya saing, pendapatan dan daya beli masyarakat, perlu dilakukan melalui peningkatan pelatihan dan keterampilan yang mampu meningkatkan produktivitas ekonomi, menumbuhkan etos wira usaha serta memberikan peluang dan akses pasar sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan daya beli masyarakat.

Perekonomian suatu daerah akan maju dan berkembang apabila daerah tersebut mampu mengelola seluruh potensi yang dimiliki, baik potensi sumberdaya manusia, sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang ada berupa asset daerah secara produktif.

Sumberdaya alam dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidupnya. Dengan demikian sumberdaya alam memiliki peran ganda yaitu sebagai modal pertumbuhan ekonomi daerah dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan.

3. Pendidikan Gratis SD/SMP/SMA dan Kesehatan Gratis.

Seperti diamanatkan dalam UUD 1945 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan maka dengan kebijakan adanya wajib belajar bagi masyarakat, maka pemerintah dapat memberikan pada setiap warganya untuk mengenyam pendidikan. Kesulitan ekonomi yang menghambat warga yang wajib belajar dapat teratasi dengan mengoptimalkan anggaran yang ada guna memberikan pendidikan yang murah/gratis. Ada perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan pengelolaan pendidikan tingkat SMA/SMK, memerlukan perhatian dan pengangan khusus bagi Kabupaten Karanganyar.

Demikian pula halnya dengan pelayanan kesehatan, setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, maka pemerintah sudah selayaknya menyediakan sarana prasarana kesehatan yang baik serta memadai.

Misi ini menyiratkan strategi yang akan ditempuh selama lima tahun, yaitu: (1) Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan pendidikan dengan mengembangkan manajemen dan sistem yang mampu mengakses seluruh anak usia sekolah mulai dari pendidikan usia dini (pra sekolah), sekolah dasar dan sekolah lanjutan, mendorong minat masyarakat untuk menyekolahkan anaknya sampai pada jenjang pendidikan tinggi serta mengembangkan model-model pendidikan kejuruan yang langsung menghasilkan mutu kelulusan yang mampu terserap di pasar kerja. Selain itu, pendidikan dan pelatihan keterampilan terus di dorong untuk meningkatkan kemampuan produktivitas masyarakat; (2) Peningkatan derajat dan jangkauan pelayanan kesehatan dengan mengembangkan manajemen dan sistem yang mampu memberikan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang cepat, murah dan terjangkau sehingga mampu menciptakan masyarakat Karanganyar yang sehat, cerdas dan produktif, (3) Peningkatan peranan wanita dilakukan mengingat peranan wanita memegang peranan penting dalam proses peningkatan kualitas hidup mulai dari peranan kodratinya sampai pada partisipasi gender dalam proses perubahan sosial dalam suatu proses pembangunan bangsa, (4) Pembinaan dan pengembangan kapasitas generasi muda dilakukan dengan mengembangkan

manajemen yang mampu mendorong kreatifitas, inovasi, kerja keras, serta keimanan dan ketakwaan segenap potensi kepemudaan sehingga mampu melahirkan generasi muda yang tangguh, profesional dan mandiri.

4. Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan.

Desa merupakan pusat pemerintahan terbawah, maka sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus baik pembangunan fisik maupun non fisik. Perekonomian harus digalakkan dari desa, tersedianya sumberdaya aparat yang baik, serta terciptanya persatuan dan kesatuan kehidupan masyarakat.

Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pembangunan di Kabupaten Karanganyar, maka pengembangan sektor prioritas, sektor unggulan dan sektor pendukung harus dilakukan secara sinergis di suatu desa sebagai satuan wilayah pengembangan, sehingga wilayah tersebut dapat berkembang secara pesat, dapat memberikan sumbangan untuk mendorong percepatan pembangunan Kabupaten Karanganyar terutama terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ini membutuhkan sumberdaya manusia yang mampu mendesain langkah-langkah strategis, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), dan mengelola potensi yang ada, program dan regulasi yang tepat, membangun kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak, menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban serta membuka akses marketing melalui promosi tentang potensi yang dimiliki desa, maka dengan sendirinya sektor-sektor potensi tersebut akan berkembang dengan pesat

Apabila potensi ekonomi daerah tersebut dapat dikelola dengan baik, maka akan menahan aliran uang yang berputar di suatu daerah, selain itu apabila daerah tersebut dapat menghasilkan lebih untuk di ekspor ke luar daerah, maka dengan sendirinya akan menambah jumlah aliran uang yang beredar di daerah tersebut. Dengan semakin banyak uang yang beredar maka akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat dan membuat masyarakat memiliki pendapatan dan dapat meningkatkan daya beli serta kemampuan membayar pajak dan restribusi bagi pemerintah daerah.

5. Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya.

Perbedaan keyakinan bukan menjadi keretakan memudarnya kehidupan kekeluargaan di masyarakat. Perbedaan merupakan rahmatan yang harus disyukuri. Hal ini akan menimbulkan rasa saling hormat menghormati. Peningkatan kualitas keagamaan, sosial dan budaya maka akan dapat menumbuhkembangkan semangat kekeluargaan serta persatuan dan kesatuan.

Ke 5 (lima) misi tersebut menjadi fokus atau prioritas kemajuan Karanganyar. Kemajuan ini tidak mungkin terwujud dan terlaksana tanpa ada peran pemerintah yang mengaturnya, menata atau memfasilitasi serta melaksanakannya. Memperhatikan hal ini kemajuan di bidang pemerintahan juga menjadi harapan dari semua pihak di Kabupaten Karanganyar

4.2. Sasaran Pembangunan

Mendasarkan pada kondisi perekonomian baik nasional, provinsi serta tantangan yang dihadapi pada tahun mendatang maka prospek perekonomian pada tahun 2018, dengan merujuk pada capaian indikator makro dalam RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2018 (Tabel 9.1 halaman IX-4) adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1. Perubahan Capaian Indikator Makro Kabupaten Karanganyar Tahun 2018.

| No | Indikator Makro | Penetapan | Perubahan |
|----|--|---------------|---------------|
| 1. | Pertumbuhan ekonomi menurut harga konstan (%) | 6,23 | 6,23 |
| 2. | Inflasi (%) | 3,6 (±) | 3,6 (±) |
| 3. | PDRB perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) (Rp.) | 29.991.414,40 | 29.991.414,40 |
| 4. | Pendapatan perkapita atas dasar harga berlaku (ADHB) (Rp.) | 26.456.680,91 | 26.456.680,91 |
| 5. | Penduduk miskin (%) | 11,64 | 11,64 |
| 6. | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 82,7 | 82,7 |

Memperhatikan hasil evaluasi Triwulan I dan II, serta ketersediaan dana untuk pelaksanaan pembangunan dalam APBD penetapan, serta perkiraan kemampuan dana pada APBD Perubahan 2018, maka dirasakan perlu untuk melakukan perubahan capaian indikator makro dan indikator sasaran sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :

Tabel 4.2. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Indikator Target dalam Pencapaian Misi RPJMD Kabupaten Karanganyar

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|---|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| I. Membangun Infrastruktur Menyeluruh | 1.1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur terutama pendukung pertumbuhan ekonomi | 1.1.1. Meningkatnya sarana prasarana perhubungan / transportasi | 1) Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik | 65,10% | 65,10% |
| | | | 2) Proporsi panjang jembatan dalam kondisi baik | 84,30% | 84,30% |
| | | | 3) Persentase proporsi panjang jalan dengan lebar > 6,00 m | 90% | 90% |
| | | | 4) Jumlah Fasilitas Keselamatan berupa : | | |
| | | | 4.1. Jumlah rambu lalu lintas dan RPPJ | 2680 | 2680 |
| | | | 4.2. Panjang marka jalan | 3115 M1 | 3115 M1 |
| | | | Panjang Guardrill | 2648 M1 | 2648 M1 |
| | | | Jumlah Traffic Cone | 558 Buah | 558 Buah |
| | | | Jumlah APILL (traffic light) | 20 Buah | 20 Buah |
| | | | Jumlah APILL (lampu flashing) | 50 Buah | 50 Buah |
| | | | Jumlah paku jalan | 1090 Buah | 1090 Buah |
| | | | Jumlah Delineator | 501 Buah | 501 Buah |
| | | | Jumlah Moving Display | 8 Buah | 8 Buah |
| | | | Jumlah kamera CCTV/ATCS | 110 Buah | 110 Buah |
| | | | | 1.1.2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur pertanian dalam arti luas yang baik | 1) Persentase kondisi jaringan irigasi baik |
| | | | 2) Persentase pemenuhan kebutuhan air baku | 45,00% | 45,00% |
| | 1.2. Meningkatkan aksesibilitas inter dan antar wilayah | 1.2.1. Koneksi antar wilayah lancar | Jumlah angkutan umum (bus dan microbus) | 461 | 461 |
| | 1.3. Meningkatkan | 1.3.1. Komunikasi | 1) Jumlah penyedia jasa komunikasi | 9 buah | 9 buah |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|------|---|---|--|---------------------|-----------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi | antar wilayah dan pelaku usaha lancar | 2) Jumlah Menara Telkom | 200 unit | 200 unit |
| | 1.4. Meningkatkan kelengkapan sarana prasana kantor milik pemerintah penyelenggara pelayanan publik | 1.4.1. Kecukupan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah | 1) Proporsi pembangunan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah | 100,00% | 100,00% |
| | | | 2) Ruang Kelas sesuai standar nasional pendidikan | | |
| | | | SD/MI | 93,76% | 93,76% |
| | | | SMP/MTs | 94,50% | 94,50% |
| | | | SMA/SMK/MA | 90,00% | 90,00% |
| | | | 3) Persentase puskesmas dalam kondisi bangunan baik | 85,70% | 85,70% |
| | | | 4) Persentase pasar pemda dalam kondisi bangunan baik | 83,00% | 83,00% |
| | | | 5) Persentase terminal dalam kondisi bangunan baik | 85,00% | 85,00% |
| | | | 6) Proporsi pembangunan sarana prasarana pelayanan publik dan perkantoran pemerintah | 100,00% | 100,00% |
| | | | 7) Proporsi Sarpras RSUD dalam kondisi baik | 70,00% | 70,00% |
| | 1.5. Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan | 1.5.1. Pelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan lingkungan | 1) Jumlah sungai yang memiliki informasi status mutu air | 12 | 12 |
| | | | 2) Jumlah kecamatan yang mempunyai informasi Status kualitas udara | 17 | 17 |
| | | | 3) Persentase jumlah pengaduan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% |
| | | | 4) Persentase luas Ruang Terbuka Hijau | 15,00% | 15,00% |
| | | | 5) Persentase luas rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 11,07 | 11,07 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|---|-------------------------|--|---|---------------------|------------------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | | | 6) Cakupan kawasan lindung (hutan, air) | 7,080 Ha | 7,080 Ha |
| | | | 7) Proporsi taman kota dalam kondisi baik | 30,00% | 30,00% |
| | | | 8) Pelayanan persampahan | 55,00% | 55,00% |
| | | | 9) Proporsi penerangan jalan dalam kondisi baik | 50,00% | 50,00% |
| | | | 10) Proporsi jumlah makam dengan jumlah penduduk | 20,00% | 20,00% |
| | | | 11) Pelayanan penanggulangan kebakaran | 25,00% | 25,00% |
| | | 1.5.2. Penataan dan pengendalian tata ruang daerah | 1) Tersedianya dokumen penataan ruang | 93 | 93 |
| | | | 2) Jumlah IMB | 8271 | 8271 |
| | | | 3) Persentase alih guna lahan | 0,12% | 0,12% |
| | | | 4) Jumlah terminal dalam kondisi baik | 15 | 15 |
| | | | 5) Frekuensi koordinasi dalam perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan | 12 kali | 12 kali |
| | | | 6) Jumlah dokumen TATRALOK (Tata Transportasi Lokal) Kab. Karanganyar | 1 | 1 |
| | | 1.5.3. Pemenuhan kebutuhan air bersih, sanitasi, perumahan layak huni | 1) Persentase cakupan layanan air bersih perkotaan | 93,06% | 93,06% |
| | | | 2) Persentase cakupan layanan air bersih perdesaan | 87,00% | 87,00% |
| | | | 3) Persentase cakupan layanan sanitasi | 67,50% | 67,50% |
| | | | 4) Cakupan penanganan rumah tak layak huni | 8718 | 8718 |
| II. Menciptakan 10.000 Wirausahawan Mandiri | 2.1. Mengembangkan UMKM | 2.1.1. Berkembangnya UMKM sektor pertanian, peternakan, industri, perdagangan, | 1) Jumlah LKM aktif | 850 | 850 |
| | | | 2) Jumlah Kelompok Belajar Usaha (KBU) Mandiri | 40 Klp (400 Org) | 40 Klp (400 Org) |
| | | | 3) Jumlah Kewirausahaan Pemuda (KWP) yang aktif | 50 Klp (250 Org) | 50 Klp (250 Org) |
| | | | 4) Pertumbuhan Jumlah produk/ komoditas | 6 | 6 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|---|---|---|--|---------------------|-----------------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | | koperasi dan jasa | OVOP | | |
| | | | 3) Persentase koperasi sehat | 45 | 45 |
| | | | 4) Jumlah koperasi aktif | 885 | 885 |
| | | | 5) Persentase pertambahan usaha mikro | 50,00% | 50,00% |
| | | | 6) Persentase pertumbuhan usaha kecil | 50,00% | 50,00% |
| | | | 7) Jumlah kunjungan wisatawan yang masuk obyek wisata | 5.480.000 orang | 5.480.000 orang |
| | | | 8) Jumlah obyek wisata yang terawat dan dilestarikan | 15 obyek wisata | 15 obyek wisata |
| | 2.2. Menurunkan jumlah penganggur | 2.2.1. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna/padat karya | 1) Jumlah penambahan usaha mikro yang menggunakan teknologi tepat guna | 100 | 100 |
| | | | 2) Penambahan jumlah usaha dengan penyerapan tenaga kerja | 433 | 433 |
| | 2.3. Meningkatkan iklim usaha dan pengembangan modal | 2.3.1. Meningkatnya investasi di daerah | 1) Jumlah investor PMA & PMDN | 74 | 74 |
| | | | 2) Nilai Investasi (milyar rupiah) | 9800 | 9800 |
| | | | 3) Jumlah Komoditas perdagangan keluar daerah | 10 | 10 |
| | | | 4) Jumlah sentra industri | 333 | 333 |
| III. Mewujudkan Pendidikan Gratis SD/ SMP/ SMA dan Kesehatan Gratis | 3.1. Mewujudkan pelayanan pendidikan berkarakter yang adil, prima, dan gratis di tingkat SD, SMP/ dan SMA/SMK | 3.1.1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat | 1) Angka pendidikan yang ditamatkan | 10 tahun | 10 tahun |
| | | 3.1.1.1. Meningkatnya kesempatan mengenyam pendidikan 12 tahun bagi penduduk Kab. Karanganyar , terutama kelompok | 1) Angka Partisipasi Kasar(APK) | | |
| | | | APK SD/MI/SDLB | 115,00 | 115,00 |
| | | | APK SMP/MTs/SMPLB | 102,25 | 102,25 |
| | | | APK SMA/MA/SMK | 65,92 | 65,92 |
| | | | 2) Angka Partisipasi Murni(APM) | | |
| | | | APM SD/MI/SDLB | 99,75 | 99,75 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|------|--------|---|--|---------------------|-----------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | | miskin | APM SMP/MTs/SMPLB | 71,50 | 71,50 |
| | | | APM SMA/MA/SMK | 45,50 | 45,50 |
| | | | 3) Angka Putus Sekolah | | |
| | | | SD/MI/SDLB | 0,01 | 0,01 |
| | | | SMP/MTs/SMPLB | 0,05 | 0,05 |
| | | | SMA/MA/SMK | 0,02 | 0,02 |
| | | | 4) Angka melek huruf | 99,91 | 99,91 |
| | | 3.1.1.2. Meningkatkan mutu pelayanan pendidikan | 1) Angka rata-rata lama sekolah (Tahun) | | |
| | | | SD/MI/SDLB | 6,05 | 6,05 |
| | | | SMP/MTs/SMPLB | 3 | 3 |
| | | | SMA/MA/SMK | 3 | 3 |
| | | | 2) Angka kelulusan : | | |
| | | | SD/MI/SDLB | 100 | 100 |
| | | | SMP/MTs/SMPLB | 99,50 | 99,50 |
| | | | SMA/MA/SMK | 99,98 | 99,98 |
| | | | 3) Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV | | |
| | | | SD/MI/SDLB | 100 | 100 |
| | | | SMP/MTs/SMPLB | 100 | 100 |
| | | | SMA/MA/SMK | 100 | 100 |
| | | 3.1.1.3. Pemenuhan dan pemanfaatan Sarana prasana pendidikan secara optimal dan efisien | Ruang Kelas sesuai standar nasional pendidikan | | |
| | | | SD/MI/SDLB | 93,76 | 93,76 |
| | | | SMP/MTs/SMPLB | 94,5 | 94,5 |
| | | | SMA/MA/SMK | 90 | 90 |
| | | 3.1.1.4. Meningkatkan wawasan dan | 1) Jumlah Perpustakaan | 65 | 65 |
| | | | 2) Jumlah Pengunjung | 34.000 | 34.000 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|------|---|---|---|---------------------|------------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | | pengetahuan masyarakat | | | |
| | | 3.1.1.5. Berkembangnya pendidikan berkarakter | 1) Peningkatan prestasi siswa di bidang pendidikan, olahraga dan senibudaya | 60 | 60 |
| | | | 2) Kewirausahaan diintegrasikan dalam kurikulum | 10 sekolah | 10 sekolah |
| | 3.2. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang adil, prima dan gratis secara bertahap | 3.2.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat | 1) IPM | 82,7 | 82,7 |
| | | | 2) UHH | 72,45 | 72,45 |
| | | | 3) Angka kesakitan (% per 100.000 KH) | 60 | 60 |
| | | 3.2.1.1. Meningkatnya kesempatan layanan kesehatan bagi penduduk Kab. Karanganyar | 1) Cakupan dan jenis pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin (%) | 100 | 100 |
| | | | 2) Rasio balita per satuan Posyandu (jiwa / posyandu) | 35 | 35 |
| | | 3.2.1.2. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan | 1) Rasio dokter per satuan penduduk (per jiwa) | 1/3.300 | 1/3.300 |
| | | | 2) Rasio dokter gigi per satuan penduduk (per jiwa) | 1/9.000 | 1/9.000 |
| | | | 3) Rasio perawat per satuan penduduk (per jiwa) | 1/2.250 | 1/2.250 |
| | | | 4) Rasio bidan per satuan penduduk (per jiwa) | 1/3.000 | 1/3.000 |
| | | | 5) Jumlah Penyuluh KB | 89 | 89 |
| | 6) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat | | 90 | 90 | |
| | 3.2.1.3. Ketersediaan dan | 1) Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk | 1/170.000 | 1/170.000 | |
| | | 2) Rasio puskesmas (per jiwa penduduk) | 1/43.673 | 1/43.673 | |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|---|--|---|---|---------------------|-----------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | | pemanfaatan Sarana prasana kesehatan secara optimal dan efisien | 3) Rasio klinik per satuan penduduk (per jiwa penduduk) | 1/10.000 | 1/10.000 |
| | | 3.2.1.4. Meningkatnya partisipasi masyarakat meningkatkan pola hidup sehat dan lingkungan sehat (kesehatan preventif) | 1) Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 100 | 100 |
| | | | 2) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA | 100 | 100 |
| | | | 3) Angka Kematian Demam Berdarah <i>Dengue</i> | 2,4 | 2,4 |
| | | | 4) Angka penemuan kasus : HIV/AIDS (per 100.000 jiwa) | 5 | 5 |
| | | | TB Paru (%) | 70 | 70 |
| | | | Malaria (API) per 1.000 penduduk | 0,05 | 0,05 |
| | | | 5) Angka Prevalensi Gizi Buruk | 0,85 | 0,85 |
| | | | 6) Persentase <i>Drop Out</i> Keluarga Berencana (%) | 13,00 | 13,00 |
| | | | 7) Persentase <i>Unmet Need</i> (%) | 10 | 10 |
| | | | 8) Persentase <i>Contraceptive Prevalance Rate</i> (CPR) | 65 | 65 |
| IV. Mewujudkan Pembangunan Desa sebagai Pusat Pertumbuhan | 4.1. Pemerataan pembangunan wilayah untuk meningkatkan sumbangan desa bagi perekonomian daerah | 4.1.1. Berkembangnya sarana prasarana dan kegiatan ekonomi perdesaan | 1) Jumlah klaster usaha di desa | 6 | 6 |
| | | | 2) Jumlah pasar desa aktif | 35 | 35 |
| | | | 3) Persentase jalan penghubung antar desa kategori baik | 62,50% | 62,50% |
| | | | 4) Persentase jembatan penghubung antar desa | 84,60% | 84,60% |
| | | 4.1.2. Meningkatnya keswadayaan dan kegotongroyongan | 1) Persentase kontribusi swadaya masyarakat untuk pembangunan di tingkat desa/kelurahan | 45% | 45% |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|---|---|--------------------------------------|---|---------------------|-------------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | | masyarakat dalam pembangunan desa | 2) Frekuensi kegiatan swadaya masyarakat desa per tahun | 8 | 8 |
| | 4.2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi serta pemasaran hasil | 4.2.1. Pertumbuhan nilai produksi | 1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB (%) | 21,06 | 21,06 |
| | | | 2) Jumlah produksi padi (ton) | 280.004,83 | 280.004,83 |
| | | | 3) Jumlah produksi palawija/non padi (ton) | 190.957,43 | 190.957,43 |
| | | | 4) Jumlah produksi tebu (ton) | 10.212,20 | 10.212,20 |
| | | | 5) Jumlah produksi daging (kg) | 22.838.277 | 22.838.277 |
| | | | 6) Jumlah produksi perikanan tangkap (kg) | 587.647 | 587.647 |
| | | 4.2.2. Tingkat aman ketahanan pangan | 1) Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan | 100,00% | 100,00% |
| | | | 2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | 98,00% | 98,00% |
| | | | 3) Penguatan Cadangan Pangan (Ton) | 100 | 100 |
| | | | 4) Ketersediaan Energi dan Protein per Kapita (kkal/kap/hr) | 2800/60 | 2800/60 |
| | | | 5) Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 14 kelompok | 14 kelompok |
| | | | 6) Stabilitas harga dan pasokan pangan | 98,50% | 98,50% |
| | | | 7) Penanganan Daerah rawan pangan | 100,00% | 100,00% |
| V. Meningkatkan Kualitas Keagamaan, Sosial dan Budaya | | 5.1. Meningkatkan kualitas keagamaan | 5.1.1. Menurunnya potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku ras dan agama | 1) Jumlah Konflik | 0 |
| | 2) Jumlah rumah ibadah | | | 3100 | 3100 |
| | 3) Jumlah perpustakaan rumah ibadah | | | 31 | 31 |
| | 5.2. Meningkatkan derajat kesejahteraan sosial | 5.2.1. Menurunnya PMKS | 1) Jumlah GEPENG, ANJAL, PSK, | 125 | 125 |
| | | | 2) Cakupan Jenis layanan DIFABEL | 4 keg | 4 keg |
| | | 5.2.2. Berkembangnya | 1) Jumlah kasus pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) | 150 | 150 |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|------|--|--|---|---------------------|-------------------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | | budaya hidup tertib dan disiplin | | | |
| | | 5.2.3. Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender | 1) Indek Pembangunan Gender | 70 | 70 |
| | | | 2) Indeks pemberdayaan gender | 67 | 67 |
| | | | | | |
| | 5.3. Menumbuh kembangkan sikap masyarakat yang melestarikan budaya daerah | 5.3.1. Adat dan Budaya daerah dilestarikan | 1) Jumlah lokasi pelestarian cagar budaya | 4 | 4 |
| | | | 2) Jumlah kelompok seni dan budaya yang aktif | 467 | 467 |
| | | | 3) Jumlah penyelenggaraan event adat daerah | 12 | 12 |
| | | | | | |
| | 5.4. Meningkatkan kapasitas aparatur menyelenggarakan tugas secara profesional dan akuntabel | 5.4.1. Pelayanan bebas KKN dan dapat dipertanggung jawabkan secara terbuka kepada publik | 1) SKPD yang melakukan pengukuran IKM | 5 | 5 |
| | | | 2) Opini BPK (WTP) | WTP | WTP |
| | | | 3) Ketersediaan regulasi daerah yang mengatur keterbukaan informasi publik | 1 Perbup dan 1 SK | 1 Perbup dan 1 SK |
| | | | 4) Ketersediaan unit layanan informasi publik (PPID) | 215 PPID | 215 PPID |
| | | | 5) Ketersediaan mekanisme pengaduan masyarakat (<i>complaint handling</i>) diSKPD | 1 sistem | 1 sistem |
| | | | 6) Ketersediaan regulasi yang memberi ruang partisipasi masy dlm pengambilan keputusan & proses pemb yg menyangkut hajat hidup org banyak | 1 Perda | 1 Perda |
| | | | 7) Penetapan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta laporan kegiatan tepat waktu | 18 | 18 |
| | | 5.4.2. Mengembangkan sistem tata kelola pemerintahan yang demokratis dan | 1) Jenis dan jumlah ketersediaan forum/ruang bagi masyarakat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan | 3 Forum | 3 Forum |

| MISI | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR SASARAN | Target Capaian 2018 | |
|------|-----------------------------------|---|--|---------------------|-----------|
| | | | | Penetapan | Perubahan |
| | | akuntabel | 2) Kehadiran masyarakat dalam Musrenbang | 350 | 350 |
| | | | 3) Jumlah aduan masyarakat | 20 | 20 |
| | | | 4) Publikasi prioritas pembangunan daerah | 1 | 1 |
| | | | 5) Publikasi APBD | 2 | 2 |
| | | | 6) Frekuensi dialog publik secara terbuka | 50 kali | 50 kali |
| | | | 7) Jenis media dan frekuensi update publikasi rencana kebijakan daerah kepada masyarakat kabupaten Karanganyar | 3 jenis | 3 jenis |
| | 5.5. Melaksanakan penegakan hukum | 5.5.1. Terwujudnya penegakan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan | 1) Cakupan tertanganinya pelanggaran perda (%) | 95 | 95 |
| | | | 2) Jumlah kegiatan operasi pekat (kegiatan / th) | 80 | 80 |
| | | | 3) Menurunnya pelanggaran perda (%) | 65 | 65 |

Sumber : RPJMD 2013-2018

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional dan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2018 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional. Arah kebijakan pembangunan daerah berpedoman pada:

1. Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan bidang sosial; dan
2. Arah kebijakan pembangunan daerah yang mendukung prioritas nasional.

Berikut adalah arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten sesuai Tema RKP, RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten Tahun 2018. Arah kebijakan Nasional : **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**; Provinsi : **”Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari”**. dan Kabupaten : **“Pemantapan daya saing wilayah dan kesejahteraan sosial”**. Sinergitas tersebut dicantumkan dalam bentuk matrik sebagaimana Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Sinergitas Prioritas Nasional, Provinsi dan Kabupaten Tahun 2018.

| NO | PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN |
|----|--|---|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Pendidikan 1) Pendidikan Vokasi 2) Pendidikan kualitas guru | Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar.: 1) Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP; 2) Penyediaan pendampingan BOS; 3) Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/ SMK/ SLB; | Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis; : 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini; 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; 3) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal; 4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan; 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan; |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN |
|----|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. | Kesehatan 1) Peningkatan kesehatan ibu dan anak 2) Pencegahan dan penanggulangan penyakit 3) Preventif dan promotif (gerakan Masyarakat Hidup Sehat) | Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar.: 1) Peningkatan pelayanan kesehatan; 2) Peningkatan pelayanan sosial; 3) Peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan | Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis : 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat; 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit; 4) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin; 5) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya; 6) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata; 7) Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD RS); 8) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita; 9) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak; 10) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak dan Perempuan; 11) Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; |
| 3. | Perumahan dan Permukiman 1) Penyediaan perumahan layak 2) Air bersih dan sanitasi | Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.: 1) Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan sampah/TPA; 2) Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah; | Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan jembatan dan irigasi : 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 2) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; 3) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Permukiman; 4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 5) Program Pembangunan Saluran/Gorong-gorong. |
| 4. | Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata 1) Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10 kawasan) 2) Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10 kawasan) 3) Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14 kawasan) | Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan : 1) Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM 2) Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/ kerjasama usaha 3) Peningkatan realisasi dan persebaran investasi 4) Pengembangan ketenagakerjaan 5) Pembangunan pariwisata | Pengembangan produk unggulan dengan kualitas, harga dan kemasan yang berdaya saing : 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif; 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; 4) Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata; 5) Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan. |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN |
|----|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 4) Perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja 5) Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi | sesuai potensi lokal daerah | |
| 5. | Ketahanan Energi 1) EBT dan konservasi energi 2) Pemenuhan kebutuhan energi | Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.: 1) Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE); 2) Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : 1) Program Lingkungan Sehat; 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 4) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 5) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; 6) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri. |
| 6. | Ketahanan Pangan 1) Peningkatan produksi pangan 2) Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi) | Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan.: 1) Pengembangan komoditas pertanian dan pangan; 2) Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran; 3) Pemanfaatan lahan melalui <i>integrated farming system</i> (IFS); 4) Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing; 5) Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap 6) Pengembangan lumbung cadangan pangan; | Pengembangan produk unggulan dengan kualitas, harga dan kemasan yang berdaya saing; : 1) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 3) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 4) Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan. Peningkatan nilai ekspor; : 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan; 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan; 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan; 5) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; |
| 7. | Penanggulangan Kemiskinan 1) Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran 2) Pemenuhan kebutuhan dasar 3) Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi | Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin : 1) Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan; 2) Jaminan perlindungan sosial; 3) Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS; 4) Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; 5) Pengembangan | Peningkatan nilai ekspor; : 1) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani; 2) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata; 3) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; Pengembangan produk unggulan dengan kualitas, harga dan kemasan yang berdaya saing : 1) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah; 2) Program Pengembangan Budidaya Perikanan; 3) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; Peningkatan kesadaran dan |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN |
|-----|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | kewirausahaan pemuda; 6) Penyediaan Data PMKS yang terintegrasi NIK; 7) Verifikasi dan validasi sasaran program KJS | ketaatan masyarakat terhadap hukum; 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah; 2) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; |
| 8. | Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman 1) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara dan intermoda) 2) Pengembangan telekomunikasi dan informatika | Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.: 1) Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan; 2) Penanganan infrastruktur perhubungan; 3) Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah; | Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan jembatan dan irigasi : 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya; 2) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku; 3) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman; 4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan; 5) Program Pembangunan Saluran/Gorong-gorong. |
| 9. | Pembangunan Wilayah 1) Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal 2) Pembangunan perdesaan 3) Reformasi agraria 4) Pencegahan dan penanggulangan bencana 5) Percepatan pembangunan Papua | Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana.: 1) Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan; 2) Penanganan infrastruktur perhubungan; 3) Penanganan infrastruktur jaringan irigasi dan sumberdaya air lainnya; 4) Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan sampah/TPA; 5) Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah; 6) Mitigasi dan penanganan bencana | Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan : 1) Program Lingkungan Sehat; 2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 3) Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas; 4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor; 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan; 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam; 8) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan; 9) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan; |
| 10. | Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan 1) Penguatan pertahanan 2) Stabilitas politik dan keamanan 3) Kepastian hukum 4) Reformasi birokrasi | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerin tahan yang bersih dan baik : 1) Pemantapan kondusivitas wilayah 2) Peningkatan partisipasi masyarakat 3) Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi 4) Gerakan revolusi mental 5) Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah 6) Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan | Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum; : 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan; 2) Program Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan; 3) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH; 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; 5) Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan; |

| NO | PRIORITAS NASIONAL | PRIORITAS PROVINSI | PRIORITAS KABUPATEN |
|----|--------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS 7) Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan | 6) Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Masyarakat dan Pembangunan; 7) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan. 8) Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi; Mendorong kerukunan hidup beragama : 1) Program Pengembangan Nilai Budaya.; 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya; 3) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; |

4.3. Prioritas Pembangunan

1) Kebijakan dan Prioritas Nasional Tahun 2018

Tema pembangunan nasional Tahun 2018 yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah **“Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”**. Prioritas nasional tahun 2018 meliputi 10 (sepuluh) program prioritas yaitu :

- 1) Pendidikan
 - a. Pendidikan Vokasi
 - b. Pendidikan kualitas guru
- 2) Kesehatan
 - a. Peningkatan kesehatan ibu dan anak
 - b. Pencegahan dan penanggulangan penyakit
 - c. Preventif dan promotif (gerakan Masyarakat Hidup Sehat)
- 3) Perumahan dan Permukiman
 - a. Penyediaan perumahan layak
 - b. Air bersih dan sanitasi
- 4) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
 - a. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10 kawasan)
 - b. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10 kawasan)
 - c. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14 kawasan)
 - d. Perbaiki iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja
 - e. Peningkatan ekspor barang dan jasa bernilai tambah tinggi
- 5) Ketahanan Energi

- a. EBT dan konservasi energi
- b. Pemenuhan kebutuhan energi
- 6) Ketahanan Pangan
 - a. Peningkatan produksi pangan
 - b. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
- 7) Penanggulangan Kemiskinan
 - a. Jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran
 - b. Pemenuhan kebutuhan dasar
 - c. Peningkatan daya saing UMKM dan koperasi
- 8) Infrastruktur, Konektivitas dan Kemaritiman
 - a. Pengembangan sarana dan prasarana transportasi (darat, laut, udara dan intermoda)
 - b. Pengembangan telekomunikasi dan informatika
- 9) Pembangunan Wilayah
 - a. Pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal
 - b. Pembangunan perdesaan
 - c. Reformasi agraria
 - d. Pencegahan dan penanggulangan bencana
 - e. Percepatan pembangunan Papua
- 10) Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan
 - a. Penguatan pertahanan
 - b. Stabilitas politik dan keamanan
 - c. Kepastian hukum
 - d. Reformasi birokrasi

2) Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Tahun 2018 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018, menjadi tahun yang bersifat strategis untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Strategi dan kebijakan terutama diarahkan untuk : **"Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berdikari"**. Prioritas pembangunan Jawa Tengah 2018 meliputi :

- 1) Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan;

- 2) Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin;
- 3) Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar;
- 4) Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan;
- 5) Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana;
- 6) Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.

Secara rinci **prioritas pembangunan** dijabarkan dalam **Fokus Pembangunan** lebih rinci sebagai berikut :

Tabel 4.4. Prioritas dan Fokus Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

| No | Prioritas | Fokus Pembangunan |
|----|---|--|
| 1 | Penguatan daya saing ekonomi daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas dan daya saing koperasi dan UMKM 2. Penguasaan akses dan informasi pasar, promosi, kemitraan/ kerjasama usaha 3. Peningkatan realisasi dan persebaran investasi 4. Pengembangan ketenagakerjaan 5. Pembangunan pariwisata sesuai potensi lokal daerah |
| 2 | Penguatan percepatan penanggulangan kemiskinan melalui upaya pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil untuk masyarakat miskin; | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perumahan; 2. Jaminan perlindungan sosial; 3. Peningkatan perlindungan, rehabilitasi, pemberian jaminan dan pemberdayaan PMKS; 4. Pengembangan usaha ekonomi produktif berbasis potensi lokal; 5. Pengembangan kewirausahaan pemuda; 6. Penyediaan Data PMKS yang terintegrasi NIK; 7. Verifikasi dan validasi sasaran program KJS |
| 3 | Penguatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia diberbagai bidang dan cakupan layanan sosial dasar. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan secara bertahap Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas Baru SMA/SMK/SLB sesuai SNP; 2. Penyediaan pendampingan BOS; 3. Peningkatan kualifikasi S1/D4 dan sertifikasi bagi pendidik SMA/ SMK/ SLB; 4. Peningkatan pelayanan kesehatan; 5. Peningkatan pelayanan sosial; 6. Peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan |
| 4 | Penguatan ketahanan pangan dan energi yang didukung | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan komoditas pertanian dan pangan; 2. Pengembangan kawasan hortikultura buah dan sayuran; |

| No | Prioritas | Fokus Pembangunan |
|----|--|--|
| | pembangunan pertanian dalam arti luas serta pengembangan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan. | <ol style="list-style-type: none"> 3. Pemanfaatan lahan melalui <i>integrated farming system</i> (IFS); 4. Pengembangan ternak pada sentra produksi sapi dan kambing; 5. Pengembangan perikanan budidaya dan tangkap 6. Pengembangan lumbung cadangan pangan; 7. Peningkatan Rasio Elektrifikasi (RE); 8. Peningkatan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT). |
| 5 | Pemantapan pembangunan infrastruktur dengan memperhatikan keberlanjutan sumberdaya alam dan lingkungan serta pengurangan resiko bencana. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan infrastruktur jalan dan jembatan; 2. Penanganan infrastruktur perhubungan; 3. Penanganan infrastruktur jaringan irigasi dan sumberdaya air lainnya; 4. Penanganan infrastruktur air minum, sanitasi dan drainase di daerah kumuh perkotaan dan miskin pedesaan serta pengelolaan sampah/TPA; 5. Rehabilitasi hulu DAS dan pesisir (mangrove) dan pemantauan kualitas air, udara dan tanah; 6. Mitigasi dan penanganan bencana |
| 6 | Pemantapan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantapan kondusivitas wilayah 2. Peningkatan partisipasi masyarakat 3. Perbaikan dan peningkatan kinerja birokrasi 4. Gerakan revolusi mental 5. Peningkatan nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah 6. Peningkatan peran pemuda dalam wawasan kebangsaan, keimanan dan ketaqwaan, pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan pencegahan HIV/AIDS 7. Peningkatan sarana dan prasarana keolahragaan |

3) Prioritas Pembangunan Kabupaten Karanganyar Tahun 2018

Arah kebijakan pembangunan Tahun 2018 atau tahun kelima adalah **“Pemantapan daya saing wilayah dan kesejahteraan sosial”**. Fokus ini merupakan tahap pemantapan daya saing daerah. Periode terakhir dari masa jabatan kepala daerah diharapkan menyelesaikan target-target yang perlu disempurnakan terkait pelayanan dasar, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan masalah publik/ekonomi lainnya. Fokus ini akan diterjemahkan melalui kebijakan umum:

- (1) Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis;
- (2) Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis;
- (3) Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- (4) Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan irigasi;
- (5) Pengembangan produk unggulan dengan kualitas, harga dan kemasan yang berdaya saing;

- (6) Peningkatan nilai ekspor;
- (7) Mendorong kerukunan hidup beragama;
- (8) Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum

Dari kebijakan pembangunan tersebut, kemudian dirumuskan prioritas pembangunan Tahun 2018. Keterkaitan Kebijakan Umum dan Prioritas Program Pembangunan Tahun 2018 sebagai berikut :

1. *Penerapan wajib belajar 12 tahun dan skema pendidikan gratis*; diarahkan untuk :
 - 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
 - 3) Program Peningkatan Pendidikan Non Formal;
 - 4) Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
 - 5) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
2. *Pembiayaan pelayanan kesehatan gratis*; diarahkan untuk :
 - 1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
 - 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 - 4) Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
 - 5) Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana Prasarana Puskesmas, Pustu dan Jaringannya;
 - 6) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata;
 - 7) Program Pelayanan Kesehatan (Operasional BLUD RS);
 - 8) Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak dan Balita;
 - 9) Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak;
 - 10) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan anak dan Perempuan;
 - 11) Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga;
3. *Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan*; diarahkan untuk :
 - 1) Program Lingkungan Sehat;

- 2) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan;
 - 3) Program Pengendalian dan Pengamanan lalulintas;
 - 4) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor;
 - 5) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - 6) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup;
 - 7) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - 8) Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
 - 9) Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan;
4. *Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan jalan jembatan dan irigasi; diarahkan untuk :*
- 1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya;
 - 2) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku;
 - 3) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Penerangan Jalan, Taman, dan Lingkungan Pemukiman;
 - 4) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 5) Program Pembangunan Saluran/Gorong-gorong.
5. *Pengembangan produk unggulan dengan kualitas, harga dan kemasan yang berdaya saing; diarahkan untuk :*
- 1) Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif;
 - 2) Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - 3) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - 4) Program Peningkatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - 5) Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
 - 6) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
 - 7) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
 - 8) Program Peningkatan Penerapan Tehnologi Peternakan.
6. *Peningkatan nilai ekspor; diarahkan untuk :*
- 1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan;
 - 2) Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan;
 - 3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;

- 4) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan;
 - 5) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
 - 6) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
 - 7) Program Pengembangan Pemasaran pariwisata;
 - 8) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah;
 - 9) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
7. *Mendorong kerukunan hidup beragama*; diarahkan untuk :
- 1) Program Pengembangan Nilai Budaya.;
 - 2) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - 3) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 - 4) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
 - 5) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan.
8. *Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum*; diarahkan untuk :
- 1) Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 - 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah;
 - 3) Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
 - 4) Program Pemasyarakatan Empat Pilar Kebangsaan;
 - 5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH;
 - 6) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 7) Program Peningkatan Pengelolaan Perizinan;
 - 8) Program Pelayanan Umum Pemerintahan, Masyarakat dan Pembangunan;
 - 9) Program Pelayanan Administrasi Kependudukan;
 - 10) Program Peningkatan Kesadaran Berdemokrasi.

Secara rinci program, kegiatan, dan rencana anggaran untuk masing-masing perangkat daerah akan diuraikan dalam bab berikutnya.